

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP HUBUNGAN BESARAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI DENGAN MANAJEMEN LABA: STUDI EMPIRIS PERUBAHAN PSAK NO. 7

Desriana Juvita
Sylvia Veronica Siregar
Universitas Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the effects of effectivity of board of commisioner and audit committee on the relationship between related party transactions (RPT) amount and disclosure on earnings management. This research is using 86 samples of the company in manufacturng industry on 2010 and 2011 to see the comparation of the changes in PSAK No.7. The result shows board of commisioner and audit committee effectiveness weaken the relationship between amount of RPT and earnings management. Moreover, disclosure of RPT according to PSAK No.7 (revised 2010) and Bapepam-LK weaken the relationship between RPT and earnings management.

Keywords : board of commisioners, audit committee, related party transactions, earnings management, PSAK No.7, disclosure

PENDAHULUAN

Transaksi pihak berelasi (*related party transaction/RPT*) dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi salah satu sorotan penting semenjak adanya skandal besar tentang jatuhnya Enron. Dalam kasus Enron tersebut banyak terjadi RPT antara Enron dengan *special purpose entity* (SPE) yang mana direktur dari SPE tersebut tidak lain adalah CFO dari Enron (Arya, 2009). Kompleksitas dari RPT juga menjadi sorotan karena menyulitkan bagi pihak luar untuk mengidentifikasi jika ada transaksi mencurigakan atau menjadikan RPT sebagai transaksi yang oportunis.

Berdasarkan PSAK No.7 (Reformat 2007), pihak-pihak yang mempunyai pihak

berelasi adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai pihak berelasi bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Sudah banyak regulasi yang mengatur tentang penggunaan transaksi pihak berelasi dalam perusahaan. Di Amerika, akibat skandal Enron, mengeluarkan peraturan tentang pengungkapan RPT pada laporan keuangan yaitu oleh FASB melalui FAS 57 dan juga SEC selaku pengawas pasar modal. Untuk di Indonesia sendiri, transaksi pihak berelasi diatur dalam 'PSAK 7 (reformat 2007) tentang Pengungkapan Transaksi Pihak Hubungan Istimewa'. PSAK 7 (reformat 2007) sendiri

mengalami perubahan menjadi ‘PSAK 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Berelasi’. Pada PSAK terbaru ini terdapat lebih banyak pengungkapan yang wajib diungkapkan oleh entitas pelapor seperti pengungkapan yang berelasi pada pemerintah, imbal hasil kerja, pengungkapan terhadap total kompensasi personil manajemen kunci, dan rincian unsur-unsur transaksi yang harus diungkapkan secara terpisah untuk setiap kategori pihak yang berelasi. Selain itu terdapat peraturan tambahan bagi perusahaan publik dan emiten melalui peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, yang menyebutkan beberapa ketentuan pada bagian transaksi dengan pihak berelasi. Juga terdapat standar audit khusus untuk pihak yang memiliki pihak berelasi yaitu Standari Audit (SA 334). Dalam SA 334 disebutkan bahwa auditor harus waspada akan adanya transaksi antarpihak yang memiliki pihak berelasi yang material yang dapat mempengaruhi laporan keuangan dan kepemilikan bersama (*common ownership*) atau hubungan pengendalian manajemen (SA 334 par.4). SA 334 juga menyebutkan bahwa auditor harus waspada terhadap kemungkinan bahwa transaksi antarpihak yang memiliki hubungan berelasi dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan aktivitas manajemen laba seperti keinginan yang mendesak untuk mencatat tingkat laba yang tinggi secara berkelanjutan

dalam upaya untuk mendukung harga saham perusahaan.

Transaksi pihak berelasi atau RPT sebenarnya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis perusahaan (Gordon & Henry, 2005). Dalam melakukan ekspansi, biasanya perusahaan mendapat dukungan pendanaan dari transaksi inter perusahaan yang dilakukan karena adanya insentif dalam hal biaya modal yang lebih rendah (Farahmita, 2009). Hal yang perlu diperhatikan mengenai RPT adalah transaksi-transaksi tidak dilakukan pada harga pasar atau pada nilai wajarnya serta dipengaruhi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi sehingga terjadi potensi adanya benturan kepentingan dari beberapa pihak seperti pada pihak manajemen dan para pemegang saham khususnya para pemegang saham minoritas (Hutapea, 2008). Pada pemegang saham mayoritas atau orang dalam (*insiders*) seperti manajemen, RPT dapat menjadi mekanisme untuk menyaring keuntungan pribadi dengan memanfaatkan pengaruh mereka agar dapat mempengaruhi transaksi-transaksi sesuai dengan kepentingan mereka, yang sebaliknya menjadi kerugian pada pemegang saham lainnya. RPT biasanya dipandang tidak konsisten dengan usaha memaksimalkan kesejahteraan seluruh pemegang saham (McCahery dan Vermeulen).

Perusahaan sering kali terlibat dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan berelasi dengan berbagai tujuan

dan pengaruh. Ge et al. (2010) mengatakan bahwa RPT bisa digunakan secara positif untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya internal, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan ROA. Pada penelitian Gordon dan Henry (2005), terdapat dua pandangan tentang RPT yang berbeda. Pertama adalah jika manajemen perusahaan melakukan RPT untuk tujuan ekspropriasi pada sumber daya perusahaannya, maka mereka mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba sehingga bisa menutupi ekspropriasi tersebut. Di sisi lain, Henry dan Gordon (2005) juga berpendapat bahwa RPT secara rasional juga penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomis perusahaan. Dengan tujuan seperti itu, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena memang tidak ada hal yang perlu ditutupi. Hal yang perlu diperhatikan adalah sering kali RPT dilakukan untuk dijadikan salah satu cara untuk melakukan manajemen laba dengan memanipulasi harga transfer dengan berbagai tujuan seperti shifting income, penghindaran beban pajak, dan lain-lain (Lo et al., 2009). Walaupun begitu, keberadaan RPT tidak menunjukkan adanya kecurangan pada pelaporan laporan keuangan (Henry et al., 2007).

Agar publik mengetahui tentang kepada siapa perusahaan melakukan RPT ini, maka pengungkapan tentang transaksi yang berhubungan dengan pihak berelasi adalah

hal yang wajib untuk dilakukan pada setiap laporan keuangan perusahaan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pengungkapan RPT diatur oleh PSAK 7 dan peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7. Pengungkapan RPT sangat penting khususnya bagi investor untuk melakukan penilaian pada perusahaan. Investor cenderung melakukan penilaian lebih rendah pada perusahaan yang melakukan RPT dibanding perusahaan yang tidak melakukan RPT karena diduga terdapat potensi untuk melakukan manipulasi laba (Ge et al., 2010).

Penelitian sebelumnya tentang RPT juga membahas pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Kohlbeck dan Mayhew (2009) menyatakan terdapat hubungan negatif antara nilai perusahaan dengan perusahaan yang mempunyai transaksi pihak berelasi. Nilai pasar perusahaan yang mempunyai RPT diperkirakan 8% lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak mempunyai RPT. Sedangkan Jian (2003) juga menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi berhubungan negatif dengan nilai perusahaan.

Banyak penelitian yang mengatakan bahwa RPT sangat erat kaitannya dengan manajemen laba, bahkan investor pun melakukan penilaian pada perusahaan lebih rendah dibanding perusahaan dengan non-RPT karena diduga terdapat potensi adanya manipulasi pada laba perusahaan. Penelitian sebelumnya yaitu Gordon & Henry (2005) menyatakan bahwa transaksi pada pihak

berelasi berhubungan dengan perilaku manajemen laba. Walaupun demikian, Gordon & Henry (2005) juga menyatakan transaksi pihak berelasi sebagai faktor yang sangat berhubungan dengan manajemen laba hanya untuk beberapa jenis/tipe transaksi pihak berelasi saja. Akan tetapi, kehadiran transaksi pihak berelasi tidak selalu mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba yang lebih besar (Gordon dan Henry, 2005).

Menurut Scott (2009), manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau kepentingan perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan mereka. Perlakuan manajemen laba ini dapat menimbulkan asimetri informasi yang menyebabkan laporan keuangan jadi tidak wajar dan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya bagi para penggunanya khususnya bagi pemegang saham minoritas.

Tatakelola perusahaan mempunyai peran penting untuk mengendalikan dan menghindari adanya praktik manajemen laba yang berkaitan dengan RPT. Menurut Lo et al. (2009), seringkali transaksi pada pihak berelasi dijadikan salah satu cara untuk melakukan manajemen laba dengan cara memanipulasi harga transfer untuk berbagai tujuan seperti *shifting income*, penghindaran

beban pajak, dan lain-lain sehingga dibutuhkan peran tatakelola perusahaan untuk mengendalikan bentuk manajemen laba dalam RPT. Lo et al. (2009) mengatakan variabel tatakelola perusahaan seperti semakin besarnya *independent board* atau terdapat ahli keuangan dalam struktur komite auditnya menyebabkan perusahaan cenderung tidak melakukan manipulasi harga transfer. Selain itu penelitian Chen et al. (2007) juga menemukan bahwa penerapan *good corporate governance* menurunkan kemungkinan adanya manajemen laba. Penelitian Liu dan Lu (2007) juga menghubungkan antara manajemen laba dengan tatakelola perusahaan dengan mengenalkan perspektif *tunneling*. Penelitian ini menemukan bahwa manajemen laba sangat berhubungan dengan *tunneling* dalam konteks tatakelola perusahaan yang lemah. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan dengan tatakelola yang lebih tinggi akan mengakibatkan level manajemen laba yang lebih rendah.

Peran tatakelola perusahaan juga mempengaruhi tindakan RPT yang merugikan seperti melakukan ekspropriasi. Kohlbeck dan Mayhew (2004) dalam Hutapea (2008) menyebutkan bahwa independensi *board* (CG yang kuat) dihubungkan dengan timbulnya RPT yang rendah dan ketika terjadi RP, transaksi ini cenderung secara transparan dipublikasikan. Dengan demikian, Kohlbeck dan Mayhew (2004) menyimpulkan bahwa

peran independensi *board* mampu mencegah terjadinya RPT dan membantu pendisiplinan transparansi transaksi tersebut jika terjadi.

Salah satu komponen fungsi pengawasan CG yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah efektifitas dewan komisaris dan komite audit. Komposisi *Board of Directors*¹ dan Komite Audit berhubungan dengan kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba (Xie et al., 2002). Komite Audit yang mempunyai latar belakang finansial juga terkait dengan manajemen laba yang lebih kecil. Frekuensi pertemuan komite audit dan *board* juga terkait dengan pengurangan manajemen laba. Oleh karena itu *board* dan aktivitas komite audit merupakan faktor penting dalam menghambat tindakan manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini akan berfokus untuk meneliti pengaruh RPT terhadap manajemen laba dengan memperhitungkan faktor fungsi pengawasan *corporate governance* (tatakelola perusahaan), yaitu efektifitas dewan komisaris dan komite audit sebagai mekanisme yang diduga dapat memperlemah hubungan antara RPT dengan manajemen laba. Selain itu penelitian ini juga mencoba untuk melihat apakah pengungkapan RPT yang diwajibkan PSAK No.7 sebelum revisi dengan PSAK

1 Fungsi pengawasan dewan komisaris pada struktur *two-tier* mirip dengan *board of directors* pada struktur *one-tier*

No.7 yang telah direvisi dapat memperlemah hubungan antara besaran RPT dan manajemen laba.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Telah banyak penelitian di luar negeri yang meneliti tentang RPT baik hubungannya dengan CG, manajemen laba ataupun nilai perusahaan. Gordon dan Henry (2005) menemukan bahwa manajemen laba yang diukur dengan absolut abnormal akrual diskresioner terbukti berhubungan positif dengan RPT walaupun hanya pada transaksi tertentu saja, akan tetapi besaran RPT bukan merupakan indikasi bahwa perusahaan terlibat dalam aktivitas manajemen laba yang semakin besar. Hal ini selaras dengan penelitian Jian dan Wong (2003) yang menyatakan bahwa manajemen laba melalui RPT dilakukan dengan cara melaporkan abnormal penjualan kepada pihak berelasi ketika mereka mempunyai insentif untuk meningkatkan laba agar terhindar dari *delisted* atau sebelum menerbitkan saham baru. Jian dan Wong (2003) juga menyatakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh grup perusahaan lebih besar melakukan RPT di banding perusahaan yang tidak dalam grup.

Penelitian lainnya menghubungkan RPT dengan nilai perusahaan seperti

pada penelitian Kohlbeck dan Mayhew (2009) yang menyatakan bahwa besaran RPT mempengaruhi valuasi perusahaan, perusahaan yang mempunyai RPT secara signifikan mempunyai valuasi perusahaan yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak mempunyai RPT signifikan. Penelitian tersebut juga mirip dengan Ge et al. (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan dan mengungkapkan pendapatan perusahaan dari penjualan aset atau barang kepada pihak yang mempunyai pihak berelasi menunjukkan *valuation coefficient* yang lebih rendah dibanding perusahaan tanpa transaksi yang sama. Selain itu Jian dan Wong (2003) juga berpendapat sama bahwa RPT berhubungan negatif dengan nilai perusahaan.

RPT juga erat dengan kualitas tatakelola perusahaan (CG) pada perusahaan. Penelitian Kohlbeck dan Mayhew (2004) menyatakan bahwa mekanisme CG yang lebih lemah berhubungan dengan RPT. Salah satu RPT yang paling utama berhubungan dengan CG yang lemah adalah transaksi pinjaman dengan pihak berelasi. Independensi *board* (mekanisme CG yang kuat) dihubungkan dengan timbulnya RPT yang rendah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Lo et al. (2009) bahwa kualitas penerapan CG seperti ahli keuangan pada komite audit, presentase *independent board* adalah hal yang penting untuk menentukan penggunaan manipulasi

harga transfer (manajemen laba) pada transaksi penjualan kepada pihak berelasi.

Di Indonesia sendiri juga terdapat beberapa penelitian tentang RPT. Salah satunya adalah Farahmita (2009) yang menemukan tindakan manajemen laba yang menaikkan laba dipengaruhi keberadaan RPT apriori merugikan dan tergantung praktek CG perusahaan namun tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai transaksi. Selain itu Farahmita (2009) juga menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan RPT apriori merugikan dengan praktek CG yang lemah cenderung melakukan pengelolaan laba yang menaikkan laba sehingga praktek CG yang kuat terbukti dapat mengurangi akrual diskresioner pada perusahaan yang melakukan RPT apriori merugikan. Arya (2009) juga menemukan hal yang sama bahwa CG yang dilihat dari kualitas audit ternyata berpengaruh positif terhadap volume serta pengungkapan RPT. Akan tetapi hasil penelitian Farahmita (2009) justru bertentangan dengan Rivano (2009) yang menyatakan bahwa penerapan CG belum efektif untuk mendorong perusahaan melakukan pengungkapan transaksi pihak berelasi. Selain itu Rivano (2009) juga mengatakan bahwa ukuran perusahaan dan nilai transaksi pihak berelasi positif mempengaruhi tingkat pengungkapan RPT. Sementara itu Rachmawati (2009) mengatakan bahwa tingkat pengungkapan RPT dan

CG positif mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Tidak hanya mempengaruhi tingkat pengungkapan RPT, besaran RPT juga negatif mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Rachmawati, 2009).

Pengembangan Hipotesis

Transaksi dengan pihak yang mempunyai pihak berelasi (RPT) dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan manajemen laba. Penjualan dengan harga yang tidak wajar, penukaran barang dengan kualitas yang berbeda, pemberian remunerasi pada karyawan kunci bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan manajemen laba. RPT dapat berdampak pada adanya *income shifting* dan kerugian pada pihak-pihak tertentu. Dengan begitu diduga semakin besar nilai transaksi pihak berelasi, maka akan semakin besar dorongan untuk melakukan manajemen laba untuk menutupi kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Menurut Gordon dan Henry (2005), top manajemen pada perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi yang mempunyai tujuan untuk melakukan ekspropriasi terhadap sumber daya perusahaannya mempunyai insentif melakukan manajemen laba untuk menyesuaikan atau menutupi ekspropriasi tersebut. Namun, transaksi pihak berelasi yang berhubungan dengan tindakan manajemen laba hanya untuk beberapa tipe transaksi saja salah satunya adalah pada transaksi pemberian

pinjaman berbunga tetap (*fixed rate financing*) (Gordon dan Henry, 2005). Sementara Jian dan Wong (2008) mengatakan bahwa salah satu alat untuk melakukan manajemen laba adalah lewat transaksi pada pihak berelasi dengan menggunakan penjualan akrual baik melalui penjualan kas atau penjualan kredit. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, manajemen laba dapat diproksi dengan akrual abnormal atau akrual diskresioner.

H1: besaran nilai transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap besaran akrual diskresioner

Pengungkapan transaksi pihak berelasi pada laporan keuangan juga menjadi salah satu faktor terhadap perilaku manajemen laba. Perusahaan yang mengungkapkan transaksi RPT secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti di PSAK dan Bapepam-LK berarti perusahaan tersebut tidak ada motivasi untuk melakukan manajemen laba karena memang tidak ada yang perlu ditutupi seperti hasil ekspropriasi, *tunneling* atau kegiatan manajemen laba lainnya.

Menurut Gordon dan Henry (2005) jika perusahaan ingin para investor tidak mengetahui kalau transaksi mereka tidak terjadi pada *arm's length*, banyak perusahaan melakukan pengungkapan bahwa kebijakan harga pada perjanjian mereka dengan pihak berelasi sama dengan perjanjian dengan pihak yang tidak mempunyai pihak berelasi. Ge et

al., (2010) mengatakan bahwa pengungkapan informasi tentang RPT mengandung informasi tentang *value relevant* kepada investor di China dan para investor biasanya menilai *value relevant* lebih rendah karena pengungkapan tersebut dapat mengindikasikan adanya manajemen laba. Akan tetapi pengungkapan RPT tidak berarti mempengaruhi tindakan manajemen laba pada perusahaan karena manajemen laba dilakukan sepanjang tahun sementara pengungkapan RPT dilakukan pada akhir tahun sehingga baik atau buruknya tingkat pengungkapan RPT ditentukan dari seberapa agresif perusahaan melakukan manajemen laba. Henry et al. (2007) mengatakan bahwa RPT menjadi salah satu mekanisme untuk melakukan fraud walaupun tidak semua begitu dan hanya untuk beberapa jenis transaksi saja seperti pinjaman kepada pihak istimewa, pinjaman kepada karyawan kunci yang tidak disetujui dan/atau penjualan pada pihak istimewa dimana keberadaan pihak berelasi tersebut tidak diungkapkan. Selain itu Bachtiar (2003) juga menyatakan bahwa manajemen laba berhubungan negatif dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Maka dari itu semakin baik tingkat pengungkapan RPT pada perusahaan maka manajemen laba yang dilakukan perusahaan tersebut semakin kecil.

H2: tingkat pengungkapan RPT berpengaruh negatif terhadap besaran akrual diskresioner

Salah satu indikator untuk menilai laporan keuangan adalah informasi yang diungkapkan oleh pihak manajemen. Jika perusahaan yang melakukan manajemen laba maka tingkat pengungkapan laporan keuangan akan disesuaikan agar bisa menutupi manajemen laba tersebut sebaliknya jika perusahaan sedikit melakukan manajemen laba maka tingkat pengungkapan suatu laporan keuangan akan baik karena tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Menurut Bachtiar (2003), manajemen laba berkorelasi negatif dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Demikian pula untuk tingkat pengungkapan pada transaksi RPT, jika tingkat pengungkapan RPT tinggi atau baik maka manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan melalui RPT sedikit. Dengan tingkat pengungkapan RPT yang tinggi, maka besaran RPT yang dimiliki perusahaan memang tidak dilakukan untuk praktek manajemen laba sehingga hubungan diantaranya rendah.

H3: Pengungkapan RPT memperlemah hubungan besaran RPT dan akrual diskresioner

Seperti telah diketahui bahwa CG mempunyai peran sangat penting dalam pengawasan terjadinya tindakan ekspropriasi dalam perusahaan melalui RPT. Kohlbeck dan Mayhew (2004) mengatakan bahwa mekanisme CG yang lemah berhubungan

dengan RPT dan salah satu RPT yang paling utama berhubungan dengan CG yang lemah adalah transaksi pinjaman dengan pihak berelasi. Salah satu unsur CG yang akan dibahas pada penelitian ini adalah adanya dewan komisaris yang efektif. Karakteristik komisaris independen serta komposisi komisaris sehingga adanya bauran pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang seimbang membuat peran dewan komisaris diharapkan dapat mengawasi perusahaan khususnya pada praktik manajemen laba yang oportunistik.

Efektivitas komite audit dapat berguna sebagai pengawasan tindakan ekspropriasi perusahaan atau praktik manajemen laba yang oportunistik. Komite audit sebagai dewan yang mempunyai otoritas dalam mengawasi keuangan perusahaan seperti mengawasi internal audit, penelaahan laporan keuangan serta bekerja sama dengan eksternal audit dalam melakukan audit perusahaan dapat mengidentifikasi atau mendeteksi perilaku manajemen untuk melakukan manajemen laba khususnya melalui RPT. Xie et al. (2002) mengatakan komposisi peran *board* dan komite audit berhubungan dengan kemungkinan perusahaan akan melakukan manajemen laba. Komite audit yang mempunyai latar belakang di bidang keuangan dan frekuensi rapat komite audit berhubungan dengan mengurangnya level akrual diskresioener. Lo et al. (2009) juga mengatakan komite

audit yang mempunyai ahli keuangan juga turut mengurangi kemungkinan perusahaan memanipulasi labanya. Selain itu Parulian (2004) juga mengatakan bahwa komite audit berperan mengendalikan praktek manajemen laba yang menurunkan laba. Komite audit yang dapat menjalankan fungsinya dengan efektif diduga dapat melakukan peran pengawasan dalam pendeteksian dan pembatasan perilaku manajemen laba melalui transaksi pihak berelasi. Dengan efektifitasnya dewan komite audit, dapat diduga dapat mengidentifikasi dan mengawasi RPT yang bisa berpotensi untuk dilakukannya manajemen laba.

Hermawan (2009) mengatakan komite audit dapat menjadi substitusi dewan komisaris dalam memonitor kualitas laba jika dewan komisaris tersebut kurang efektif dalam menjalankan perannya. Hermawan (2009) juga mengatakan bahwa komite audit merupakan organ dewan komisaris yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris sehingga pada akhirnya yang berhak mengambil keputusan atas tindak lanjut atas laporan komite audit adalah dewan komisaris. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dewan komisaris dan komite audit dapat menjadi satu kesatuan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mengontrol kinerja perusahaan.

H4: Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap akrual diskresioener

Dengan adanya peran dewan komisaris dan komite audit sebagai pengawasan internal perusahaan sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku manajemen laba melalui RPT. Semakin efektif dewan komisaris dan komite audit akan menyebabkan manajemen laba yang dilakukan perusahaan akan semakin rendah karena tingkat pengawasan yang tinggi dan RPT yang dimiliki perusahaan tidak mengandung *conflict of interest*.

H5: Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit memperlemah hubungan antara besaran RPT dengan akrual diskresioner

Manajemen laba adalah hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu cara perusahaan untuk melakukan manajemen laba adalah melalui transaksi dengan pihak berelasi. Pada transaksi pihak berelasi, perusahaan akan berhubungan dengan pihak-pihak tertentu sehingga transaksi yang dilakukan diantara mereka bisa dinegosiasikan atau dilakukan perjanjian dengan syarat-syarat tertentu yang tidak bisa dinikmati oleh pihak selain yang mempunyai pihak berelasi. Pada dasarnya transaksi pihak berelasi bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kebutuhan internal perusahaan, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan ROA (Ge et al., 2010). Selain itu transaksi pihak

berelasi dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis perusahaan (Gordon dan Henry, 2005). Di sisi lain, jika digunakan secara oportunistik transaksi pihak berelasi bisa dijadikan alat potensial untuk melakukan manajemen laba. Penggunaan RPT secara oportunistik dapat bertujuan untuk meningkatkan laba, mencari keuntungan dengan menjual barang pada harga yang tidak wajar atau melalui pertukaran aset dengan kualitas yang berbeda (Ge et al., 2010). Gordon dan Henry (2005) mengatakan bahwa bagi top manajemen yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi untuk mengekspropriasi sumber daya perusahaan, maka para manajemen puncak tersebut mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba untuk menutupi ekspropriasi yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa transaksi pihak berelasi mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba.

Transaksi pihak berelasi dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua variabel yaitu nilai transaksi itu sendiri serta tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi. Variabel nilai transaksi pihak berelasi dimasukkan agar dapat melihat apakah semakin besar nilai transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan juga melakukan manajemen laba yang lebih besar. Sedangkan pada variabel pengungkapan RPT, ingin dilihat apakah semakin baik pengungkapan RPT yang dilakukan oleh

perusahaan maka besaran manajemen labanya makin kecil karena memang tidak ada yang perlu ditutup-tutupi.

Dalam hubungan antara transaksi pihak berelasi dengan manajemen laba terdapat faktor tatakelola perusahaan yang dapat mempengaruhi kedua variabel utama tersebut. Tatakelola perusahaan dikenal sebagai mekanisme untuk mengawasi kinerja perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham sehingga dapat meminimalisasi konflik keagenan. Kohlbeck dan Mayhew (2004) mengatakan bahwa transaksi pihak berelasi berhubungan dengan tatakelola perusahaan yang rendah. Unsur tatakelola perusahaan yang difokuskan pada penelitian ini adalah efektifitas dewan komisaris dan efektifitas komite audit. Dewan komisaris dan komite audit merupakan dewan yang bertugas untuk mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap aktivitas manajerial perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Dengan tanggung jawab mereka yang mengutamakan kepentingan pemegang saham, maka mereka akan mengawasi kinerja perusahaan agar tidak menimbulkan konflik atau tetap sejalan dengan tujuan perusahaan. Salah satu perhatian dewan komisaris dan komite audit adalah pengawasan terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan untuk tujuan oportunistik. Latar belakang dan aktivitas komite audit merupakan faktor yang menghambat kecenderungan manajemen dalam

melakukan manajemen laba (Wallace et al., 2002). Gordon et al. (2004) serta Kohlbeck dan Mayhew (2004) dalam Arya (2009) menemukan ukuran dewan memiliki hubungan positif dengan RPT yang dikarenakan ukuran dewan merupakan salah satu bentuk dari tatakelola perusahaan yang lemah.

Variabel pengendali yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitas audit, ukuran perusahaan, pertumbuhan, dan tingkat utang. Arya (2009) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap volume serta pengungkapan RPT. Kualitas audit dilihat berdasarkan ukuran KAP (*big four* dan *non big four*). Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang merupakan *big four* mempunyai reputasi yang lebih baik sehingga dapat memberikan penyusunan laporan keuangan dan tingkat pengungkapan yang lebih baik sehingga dapat mengidentifikasi adanya potensi manajemen laba lebih besar. Ukuran perusahaan juga menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini. Kohlbeck dan Mayhew (2004) dalam Arya (2009) menyatakan bahwa perusahaan besar lebih cenderung mengungkapkan RPT. Tingkat utang (Defond dan Jiambalvo, 1994 dalam Farahmita, 2009) dimasukkan karena sesuai dengan hipotesis *debt covenant* bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat utang yang semakin tinggi akan menaikkan laba untuk menjaga agar perusahaan tidak melanggar perjanjian utang.

METODA PENELITIAN

Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DAC_i = \alpha_0 + \alpha_1 RPT_i + \alpha_2 discRPT_i + \alpha_3 CG_i + \alpha_4 BIG4_i + \alpha_5 LEV_i + \alpha_6 SIZE_i + \alpha_7 GROWTH_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

$$DAC_i = \beta_0 + \beta_1 RPT_i + \beta_2 discRPT_i + \beta_3 CG_i + \beta_4 RPT_i * discRPT_i + \beta_5 RPT_i * CG_i + \beta_6 BIG4_i + \beta_7 LEV_i + \beta_8 SIZE_i + \beta_9 GROWTH_i + \varepsilon_i \quad (2)$$

Ekspektasi tanda: $\alpha_1 > 0$, $\alpha_2 < 0$, $\alpha_3 < 0$, $\beta_4 < 0$, $\beta_5 < 0$

Manajemen Laba (DAC)

Manajemen laba diukur dengan akrual diskresioner menggunakan model Kothari et al. (2005):

$$TACC_{it} = \delta_0 + \delta_1 / ASSETS_{it-1} + \delta_2 ((\Delta SALES_{it} - \Delta AR_{it}) / ASSETS_{it-1}) + \delta_3 (PPE_{it} / ASSETS_{it-1}) + \delta_4 RO_{it-1} + \varepsilon_{it}$$

$TACC_{it}$: Total akrual perusahaan i pada tahun t yang dapat diperoleh dengan selisih dari laba operasi berjalan dan aliran kas dari kegiatan operasi perusahaan,

TA_{it} : Total aset pada perusahaan i pada tahun t-1,

ΔREV_{it} : Selisih penjualan perusahaan i pada tahun t dengan penjualan perusahaan i pada tahun t-1,

ΔREC_{it} : Selisih piutang perusahaan i pada tahun t dengan piutang perusahaan i pada tahun t-1,

PPE_{it} : Aset tetap kotor pada tahun t,

ROA_{it-1} : Return on Asset perusahaan i pada tahun t-1.

Model ini diregresi secara *cross section*. Nilai residual dari model tersebut merupakan nilai akrual diskresioner.

Transaksi Pihak Berelasi (RPT)

RPT diukur sebagai proporsi RPT aset dan RPT liabilitas dibagi dengan total ekuitas (Rivano, 2009; Loviana, 2009).

Pengungkapan RPT (discRPT)

Nilai tingkat pengungkapan RPT dihitung berdasarkan daftar item-item yang mengacu kepada PSAK 7 (revisi 2010), PSAK 7 (reformat 2007), dan Bapepam-LK nomor VIII-7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan khususnya pada bagian transaksi dengan pihak berelasi. Tingkat pengungkapan RPT diperoleh dengan membagi nilai pengungkapan RPT yang dilakukan perusahaan dengan total pengungkapan yang diharuskan:

$$discRPT = \frac{np}{tp} \times 100\%$$

RPT disc: tingkat pengungkapan RPT, np: nilai pengungkapan RPT yang dilakukan perusahaan, tp: total pengungkapan yang diharuskan

Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit (CG)

Variabel ini merupakan rata-rata dari skor efektifitas dewan komisaris dan skor

efektivitas komite audit. Skor efektifitas dewan komisaris dan komite audit ini diperoleh berdasarkan daftar pertanyaan (*checklist*) (Hermawan, 2009). Skor efektifitas dewan komisaris dan komite audit tersebut terdiri dari aspek independensi, aktivitas, jumlah anggota (*size*), dan kompetensi, yang dinilai berdasarkan pengungkapan di laporan tahunan.

Pemilihan Sampel

Kriteria dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dalam industri manufaktur yang terdaftar di BEI kecuali industri

keuangan (bank, perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, asuransi, dan agensi kredit lain) dan industri non manufaktur lainnya pada tahun 2010 dan 2011.

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan pada tahun 2010 dan 2011.
3. Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan berelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah ringkasan pemilihan sampel masing-masing untuk tahun 2010 dan 2011:

Tabel 1 Hasil Seleksi Sampel

Kriteria	N	
	2010	2011
Perusahaan terdaftar di BEI	428	451
Perusahaan di industri non-manufaktur	(293)	(319)
Perusahaan di Industri Manufaktur yang terdaftar di BEI	135	132
Perusahaan yang tidak melakukan transaksi dengan pihak berelasi	(15)	(17)
Perusahaan yang memiliki ekuitas negatif	(9)	(9)
Data tidak lengkap	(22)	(20)
Outliers	(2)	(2)
Jumlah sampel yang digunakan	86	86

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat di tabel 2. Nilai rata-rata dengan angka negatif menunjukkan bahwa perusahaan cenderung melakukan manajemen laba yang *income decreasing* baik di 2010 dan 2011. Standar deviasi pada rata-rata akrual

diskresioner tahun 2010 lebih besar dibanding tahun 2011 sehingga menunjukkan variasi yang lebih tinggi dalam melakukan manajemen laba pada tahun 2010 dibanding 2011.

Berdasarkan nilai rata-rata RPT sebesar 26,68% dan 27,6% di tahun 2010 dan 2011, menurut Rachmawati (2009) RPT

yang terjadi di Indonesia relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara lain seperti Inggris (10%), Jepang, Taiwan, USA (20%). Rachmawati (2009) juga mengatakan hal ini sesuai dengan La Porta et al. (1999) bahwa Indonesia memiliki RPT yang tinggi karena Indonesia memiliki tingkat perlindungan hukum atas pemegang saham minoritas yang rendah.

Rata-rata efektifitas tatakelola perusahaan dilihat dari keefektifan dewan komisaris dan komite audit adalah sebesar 64% untuk tahun 2010 sedangkan rata pada tahun 2011 sebesar 66% yang menunjukkan bahwa peran dewan komisaris dan komite audit di perusahaan sampel cukup efektif. Namun jika dilihat dari nilai minimumnya yang sebesar 40% pada tahun 2010 (46% pada tahun 2011) dapat dikatakan bahwa masih terdapat dewan komisaris dan komite audit yang belum efektif.

Rata-rata pengungkapan RPT pada perusahaan adalah sebesar 67% (2010) dan 64% (2011) dari standar pengungkapan yang sesuai oleh Bapepam-LK dan PSAK No. 7. Berdasarkan nilai minimum dan maksimum terdapat perusahaan yang belum mematuhi peraturan pengungkapan dan terdapat perusahaan yang telah mengungkapkan secara lengkap dan jelas.

Analisis Hasil Regresi

Berikut adalah Tabel 3 yang menunjukkan hasil regresi model pertama

yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel utama yaitu RPT, discRPT, dan CG terhadap DACC secara langsung. Pada tahun 2010 maupun tahun 2011, besaran RPT secara signifikan berpengaruh positif terhadap akrual diskresioner. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah RPT mempengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen laba sehingga H1 diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah RPT yang dimiliki maka perusahaan akan melakukan manajemen laba lebih banyak atau semakin agresif. Hasil ini sesuai dengan Jian dan Wong (2003) yang mengatakan bahwa jumlah RPT yang semakin besar terutama pada transaksi penjualannya mengindikasikan adanya pengaruh manajemen laba dengan cara menaikkan laba agar terhindar dari *delisted* atau persiapan sebelum menerbitkan ekuitas baru. Selain itu berpengaruhnya besaran RPT terhadap akrual diskresioner dapat mengindikasikan bahwa RPT yang dilakukan perusahaan adalah transaksi yang mengandung *conflict of interest*.

Baik pada tahun 2010 maupun 2011, pengungkapan RPT dalam laporan keuangan perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba sehingga hipotesis H2 ditolak. Hal ini kemungkinan syarat-syarat pengungkapan berdasarkan PSAK No 7 (reformat 2007) belum mampu menekan tindakan manajemen laba pada perusahaan. Selain itu, tinggi atau rendahnya tingkat

pengungkapan RPT tidak mempengaruhi manajemen laba karena memang perusahaan tidak melakukan RPT yang merugikan sehingga

tidak banyak melakukan manajemen laba sehingga tidak ada pengaruh pengungkapan RPT terhadap manajemen laba.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Mean		Std. Deviasi		Min		Max	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
DACC	-0,0066	-0,0048	0,136	0,100	-0,373	-0,352	0,671	0,248
CG	0,647	0,6605	0,092	0,079	0,402	0,4608	0,827	0,817
RPT	0,26682	0,2760	0,33212	0,36376	0	0,0005	1,51996	1,51304
DISCRPT	0,6718	0,6401	0,177	0,152	0,143	0,1333	1	0,941
BIG4	0,4534	0,4651	0,500	0,501	0	0	1	1
SIZE	5.280.709	7.924.222	13.924.011	21.152.094	533.793	125.184	112.857.000	153.521.000
LEV	0,485	0,4674	0,205	0,205	0,413	0,1003	0,937	0,965
GROWTH	0,148	0,2284	0,216	0,379	-0,398	-0,6677	0,801	2.859

Keterangan: DACC (Akrual Diskresioner), CG (efektifitas dewan komisaris dan komite audit), RPT (besaran transaksi pihak berelasi), DISCRPT (pengungkapan RPT), BIG4 (kualitas audit), SIZE (ukuran perusahaan), LEV (tingkat hutang), GROWTH (pertumbuhan penjualan)

Tabel 3 Hasil Regresi Model 1

$$DACC_i = \alpha_0 + \alpha_1 RPT_i + \alpha_2 discRPT_i + \alpha_3 CG_i + \alpha_4 BIG4_i + \alpha_5 LEV_i + \alpha_6 SIZE_i + \alpha_7 GROWTH_i + \varepsilon$$

Variabel	Predicted Sign	DACC			
		2010		2011	
		Coef.	Prob>t	Coef.	Prob>t
RPT	+	0,713054	0,029**	0,035382	0,070***
DiscRPT	-	0,072165	0,123	-0,00412	0,479
CG	-	-0,26642	0,146	-0,08972	0,254
SIZE	-	0,020654	0,265	0,002507	0,498
BIG4	-	0,00191	0,324	-0,34077	0,089***
LEV	-	0,06746	0,202	-0,11845	0,034**
GROWTH	-	-0,21982	0,008*	0,015829	0,000*
Prob>F		0,0737		0,0073	
R-squared		0,2228		0,1237	
F		1,94		3,02	

DACC (Akrual Diskresioner), CG (efektifitas dewan komisaris dan komite audit), RPT (besaran transaksi pihak berelasi), DISCRPT (pengungkapan RPT), BIG4 (kualitas audit), SIZE (ukuran perusahaan), LEV (tingkat utang), GROWTH (pertumbuhan penjualan). ***signifikan di 10% , **signifikan di 5%, *signifikan di 1%

Baik pada tahun 2010 maupun 2011, efektifitas dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sehingga H4 ditolak. Dari

hasil tersebut terdapat indikasi bahwa peran dewan komisaris dan komite audit belum efektif dalam mengendalikan manajemen laba. Hal ini didukung oleh penelitian Parulian

(2004) yang menyatakan fungsi komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan belum berjalan dengan efektif karena komite audit berpengaruh positif terhadap terjadinya praktek manajemen laba yang bertujuan meningkatkan laba.

Selain penelitian Parulian (2004), hasil ini juga konsisten dengan temuan Peivy (2008) dan Siregar dan Utama (2005) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya komite audit terhadap manajemen laba. Siregar dan Utama (2005) menemukan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan yang berarti keberadaan komite audit tidak mampu mengurangi manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas dan efektifitas komite audit di Indonesia sehingga belum mampu mengurangi aktivitas manajemen laba di perusahaan (Peivy, 2009).

Tidak berpengaruhnya dewan komisaris secara signifikan terhadap DACC juga ditemukan oleh Peivy (2009) dewan komisaris yang dibahas lebih detail lagi yaitu dari ukuran dewan komisarisnya. Peivy (2009) mengatakan bahwa keadaan perusahaan di Indonesia yang sebagian besar masih berbentuk perusahaan keluarga sehingga tidak jarang banyak dari pemilik atau pendiri perusahaan menjadi anggota atau ketua dewan komisaris sehingga tidak dapat menjalankan

tugas dan fungsinya dengan baik khususnya dalam hal pengawasan dan independensi.

Baik tahun 2010 dan 2011, variabel kontrol ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pada tahun 2010, variabel BIG4 tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sehingga dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* maupun *non big four* tidak mampu menekan aktivitas manajemen laba. Menurut Peivy (2005) tidak berpengaruhnya variabel predikat KAP terhadap manajemen laba disebabkan oleh beberapa hal yaitu kualitas audit antara *big four* dan *non big four* relatif sama atau manajemen laba dilakukan tanpa melanggar standar akuntansi sehingga auditor tidak secara langsung dapat membatasi tindakan manajemen laba tersebut. Sedangkan pada tahun 2011, variabel BIG4 berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hasil ini dapat dikatakan bahwa kualitas audit mampu menekan jumlah manajemen laba pada perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh *big four* mampu menekan jumlah manajemen laba karena kredibilitasnya sebagai auditor dengan kualitas yang baik.

Pada tahun 2010, variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti bahwa tingkat

utang perusahaan terhadap total asetnya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap DACC. Pada tahun 2011, variabel *leverage* signifikan secara statistik berpengaruh negatif terhadap DACC. Hasil serupa juga ditemui oleh Farahmita (2009) yang mengatakan bahwa hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis *debt covenant* karena temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat utang maka perusahaan cenderung menurunkan laba, kemungkinan perusahaan berharap mendapatkan keringanan dari kreditur jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Pada tahun 2010, pertumbuhan perusahaan (GROWTH) secara signifikan

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sehingga menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan yang semakin baik dapat menekan perilaku manajemen laba. Sementara pada tahun 2011, GROWTH berubah menjadi berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap DACC. Hasil ini tidak sesuai dengan dugaan. Akan tetapi, hasil ini konsisten dengan Mc. Nichols (2000) dalam Farahmita (2009) yang mengatakan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai akrual diskresioner yang tinggi. Ini dilakukan perusahaan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang semakin baik.

Tabel 4.10 Hasil Regresi Model 2

$$DACC_i = \beta_0 + \beta_1 RPT_i + \beta_2 discRPT_i + \beta_3 CG_i + \beta_4 RPT * discRPT_i + \beta_5 RPT * CG_i + \beta_6 BIG4_i + \beta_7 SIZE_i + \beta_8 LEV_i + \beta_9 GROWTH_i + \varepsilon$$

Variabel	DACC				
	Predicted Sign	2010		2011	
		Coef	Prob>t	Coef	Prob>t
RPT	+	0,045479	0,134	0,134	0,0095*
DISCRPT	-	0,039466	0,268	0,268	0,302
CG	-	0,08315	0,383	0,383	0,362
RPT*CG	-	-1,05457	0,047**	0,047**	0,043**
RPT*DISCRPT	-	0,041472	0,247	0,247	0,008*
BIG4	-	0,018758	0,267	0,267	0,056***
SIZE	-	0,001171	0,388	0,388	0,425
LEV	-	0,052728	0,27	0,27	0,045**
GROWTH	-	-0,19564	0,007*	0,007*	0,038**
Prob>F		0,0407		0,0578	
R-squared		0,2809		0,1510	
F		2,09		1,95	

DACC (Akrual Diskresioner), CG (efektifitas dewan komisaris dan komite audit), RPT (besaran transaksi pihak berelasi), DISCRPT (pengungkapan RPT), BIG4 (kualitas audit), SIZE (ukuran perusahaan), LEV (tingkat utang), GROWTH (pertumbuhan penjualan). ***signifikan di 10%, **signifikan di 5%, *signifikan di 1%

Pada tahun 2010 dan 2011 variabel CG mempengaruhi secara negatif hubungan RPT dengan akrual diskresioner sehingga H5 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas komite audit dan dewan komisaris terbukti memperlemah hubungan antara besaran RPT dengan manajemen laba artinya semakin efektif tatakelola perusahaan maka besaran RPT yang dilakukan semakin besar sehingga tidak membuat manajemen laba makin tinggi melainkan makin mengecil atau sedikit dilakukan. Hal ini dapat memberikan bukti bahwa pengaruh keberadaan RPT terhadap akrual diskresioner tergantung dari kemampuan dewan komisaris dan komite audit dalam mendeteksi dan mengawasi tindakan manajemen laba. Selain itu, hasil ini juga dapat melihat bahwa peran dewan komisaris dan komite audit mampu menekan manajemen laba secara tidak langsung dan peranannya akan lebih terlihat saat menemukan adanya indikasi RPT yang merugikan. Pada perusahaan dengan dewan komisaris dan komite audit yang lemah akan mempengaruhi RPT dalam melakukan manajemen laba terutama bagi RPT yang merugikan.

Di Indonesia, hal ini sejalan dengan penelitian Farahmita (2009) bahwa RPT yang apriori merugikan pada perusahaan yang praktek CG nya lemah dapat dikatakan merupakan tindakan eksploitasi pemegang saham minoritas. Farahmita (2009) juga menjelaskan bahwa manajemen laba yang

terjadi pada perusahaan yang melakukan RPT apriori merugikan dilakukan dengan cara menaikkan laba dalam rangka untuk menutupi keputusan melakukan RPT yang merugikan perusahaan. Penelitian ini juga sesuai dengan Lo *et al.* (2009) yang menyatakan kualitas tatakelola perusahaan sangat penting untuk menghalangi manajemen laba dalam penjualan terhadap transaksi dengan pihak berelasi.

Pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan RPT tidak mempengaruhi hubungan antara besaran RPT dengan manajemen laba sehingga hipotesis H3 ditolak. Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa baik atau buruknya pengungkapan RPT tidak mampu mengurangi jumlah manajemen laba pada RPT. Selain itu hasil ini juga mengindikasikan bahwa syarat pengungkapan pada PSAK No.7 (reformat 2007) belum mampu mengurangi manajemen laba karena syarat-syarat yang diungkapkan oleh PSAK No.7 ini tidak terlalu rinci.

Sedangkan pada tahun 2011, tingkat pengungkapan RPT signifikan negatif mempengaruhi terhadap hubungan antara besaran RPT dan manajemen laba sehingga H3 diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pengungkapan RPT pada perusahaan mampu memperlemah hubungan besaran RPT terhadap manajemen laba yang berarti bahwa semakin baik tingkat pengungkapan RPT pada perusahaan maka jumlah RPT yang dilakukan untuk melakukan

manajemen laba kecil. Selain itu hasil ini juga mengindikasikan besaran RPT yang dimiliki perusahaan tergolong RPT yang tidak merugikan atau efisien.

Hasil ini berbeda dengan tahun sebelumnya dan pada tahun ini tingkat pengungkapan diukur berdasarkan tingkat pengungkapan PSAK No.7 yang baru yaitu PSAK No.7 (revisi 2010) sehingga pada hasil regresi tersebut dapat menjelaskan bahwa syarat-syarat pengungkapan pada PSAK 7 (revisi 2010) dapat memperlemah hubungan antara besaran RPT terhadap akrual diskresioner. Hal ini berarti semakin lengkap dan baik tingkat pengungkapan RPT yang sesuai dengan PSAK No.7 (revisi 2010) maka besaran RPT yang digunakan untuk melakukan manajemen laba semakin kecil.

Berdasarkan perbandingan hasil regresi kedua tahun tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PSAK 7 (revisi 2010) terbukti secara signifikan mempengaruhi besaran RPT untuk memperlemah akrual diskresioner dibandingkan PSAK 7 (reformat 2007). Pada PSAK 7 (revisi 2010) memang mensyaratkan beberapa indikator yang harus diungkapkan yang tidak diatur oleh PSAK (reformat 2007) sehingga indikator syarat pengungkapan lebih banyak.

Dengan tambahan persyaratan pengungkapan yang telah dijabarkan di atas, maka kualitas pengungkapan RPT yang sesuai dengan PSAK 7 (revisi 2010) menjadi

sangat penting dan signifikan agar jumlah nilai RPT yang dipunyai perusahaan dapat memperlemah akrual diskresioner karena memang tidak perlu ada yang ditutupi oleh manajemen perusahaan.

Penelitian ini juga melakukan beberapa pengujian sensitivitas. Pada pengujian sensitivitas pertama ditambahkan besaran RPT dari nilai transaksi yang berasal dari laporan laba rugi. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa baik nilai RPT dari laporan laba rugi dan neraca tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap besaran akrual diskresioner pada tahun 2010 dan 2011. Hasil ini berbeda dengan pengujian utama pada tahun 2010 namun konsisten dengan tahun 2011. Hal menunjukkan bahwa perusahaan dalam melakukan manajemen laba relatif tidak dipengaruhi oleh keberadaan nilai RPT baik di laporan laba rugi maupun di neraca.

Dalam pengujian utama, terdapat beberapa perusahaan yang tidak memiliki nilai CG di tahun 2011 (karena laporan tahunan perusahaan tersebut tidak tersedia) yang kemudian diukur menggunakan nilai CG dari tahun 2010. Pengujian sensitivitas kedua mengeluarkan sampel di tahun 2011 yang tidak mempunyai skor CG tersebut. Dalam pengujian ini ingin dilihat apabila hanya menggunakan sampel murni (mengurangi sampel yang memakai skor CG tahun lalu) hasilnya tetap konsisten. Hasilnya menunjukkan hasil untuk CG konsisten dengan pengujian utama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tatakelola perusahaan yang dilihat dari efektifitas dewan komisaris dan komite audit terhadap hubungannya dengan besaran nilai dan tingkat pengungkapan RPT kepada manajemen laba. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa besaran RPT berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada tahun 2010 dan 2011. Hasil ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan RPT yang merugikan atau mengandung transaksi yang *conflict of interest* sehingga mempengaruhi melakukan manajemen laba.

Kualitas pengungkapan RPT pada manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba baik di tahun 2010 dan 2011. Hal ini mungkin terjadi karena masih banyak perusahaan belum mengungkapkan informasi secara jelas dan lengkap sesuai dengan peraturan yang terdapat pada PSAK 7 dan Bapepam-LK yang berlaku.

Efektifitas dewan komisaris dan komite audit tidak mempengaruhi manajemen laba secara langsung. Hal ini dapat dikarenakan masih belum efektifnya peran dewan komisaris dan komite audit pada perusahaan di Indonesia (Siregar dan Utama, 2008; Parulian, 2004). Efektifitas dewan komisaris dan komite audit secara signifikan memperlemah hubungan antara besaran RPT dengan manajemen laba baik di tahun 2010 dan 2011 yang berarti peran dewan komisaris

dan komite audit dapat menekan manajemen laba secara tidak langsung. Peran dewan komisaris dan komite audit akan kelihatan lebih efektif saat menemukan adanya indikasi RPT yang merugikan.

Pengaruh signifikan tingkat pengungkapan RPT terhadap hubungannya antara besaran RPT dengan manajemen laba berbeda pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2010 tingkat pengungkapan tidak berpengaruh terhadap hubungannya terhadap besaran RPT dengan manajemen laba. Sementara pada 2011, tingkat pengungkapan signifikan berpengaruh untuk memperlemah hubungan besaran RPT terhadap manajemen laba. Hal ini berarti PSAK 7 (revisi 2010) terbukti lebih efektif dalam hal mengurangi praktik manajemen laba karena syarat pengungkapan pada PSAK 7 (revisi 2010) lebih banyak dan kompleks dibandingkan PSAK 7 (reformat 2007).

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 1) Sampel penelitian yang relatif kecil. Hal ini dikarenakan jangka waktu penelitian hanya tahun 2010 dan 2011 dan hanya di industri manufaktur, 2) Penelitian ini tidak membedakan antara jenis RPT yang efisien dan oportunistik, 3) Model manajemen laba yang digunakan tidak dapat dipastikan bisa memisahkan komponen akrual diskresioner dan non diskresioner secara tepat.

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi bagi regulator. Perlu adanya

peningkatan pengawasan oleh Bapepam-LK dalam hal penerapan CG khususnya peran komite audit dan dewan komisaris agar lebih efektif sebagai fungsi pengawasan, melakukan pengkajian terhadap PSAK 7 yang telah direvisi apakah sudah diterapkan dengan baik oleh perusahaan, dan mengawasi transaksi dan pengungkapan RPT yang dilakukan oleh perusahaan dan memberikan sanksi pada perusahaan yang RPT-nya terbukti menimbulkan *conflict of interest*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya, B.M. (2006). *Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Volume dan Pengungkapan Related Party Transaction*. Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bachtiar, Y.S. (2003). *Hubungan Antara Manajemen Laba dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Tesis. Depok: Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Chen, K.Y., R.J. Elder, dan Y-M., Hsieh. (2007). Corporate Governance Management: The Implications of Corporate Governance Best-Practice Principles for Taiwanese Listed Companies. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 73-105.
- Farahmita, A. (2009). *Pengaruh Praktek Corporate Governance Terhadap Hubungan Antara Transaksi Pihak berelasi (Related Party Transaction) dengan Manajemen Laba*. Tesis. Depok: Pascasarjana FEUI.
- Ge, Wenxia., D.H. Drury, S. Fortin, F. Liu, D. Tsang. (2010). Value Relevance of Disclosed Related Party Transaction. *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting* 26, 134-141.
- Gordon, E.A., dan E. Henry. (2005). Related Party Transactions and Earnings Management. *Working Paper series. Rutgers Business School*. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=612234.
- Gordon, E.A., E. Henry, dan D. Palia. (2004). Related Party Transactions: Associations with Corporate Governance and Firm Value. EFA 2004 *Maastricht Meetings Paper No. 4377*. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=558983.
- Henry, Gordon, Reed & Louwers. (2007). The Role of Related Party Transaction in Fraudulent Financial Reporting. *Working Paper*. <http://ssrn.com/abstract=993532>.
- Hermawan, A.A. (2009). Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan oleh Keluarga, dan Peran Monitoring bank terhadap kandungan informasi laba. Disertasi. Depok: Program Pascasarjana FEUI Ilmu Akuntansi.
- Hutapea, W.D. (2008). Pengaruh Komponen-komponen Corporate Governance, Struktur Kepemilikan terbesar, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya transaksi pihak berelasi (Related Party Transaction). Tesis. Depok: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). *Pernyataan Standar Akuntan Publik. SA No.7 Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Pihak berelasi: 1994*.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntan Publik. SA No.7 Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Pihak berelasi.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. SA No.34. Pihak yang Memiliki Pihak berelasi.
- Jian, M., dan T.J. Wong. (2003). Earnings Management and Tunneling Through Related Party Transactions: Evidence from Chinese Corporate Groups. *EFA 2003 Annual Conference Paper*. http://papers.ssrn.com/sol3/papers/cfm?abstract_id=424888.
- Jian, M., dan T.J. Wong. (2008). Propping Through Related Party Transactions. *Rev. Account Stud*, 15, 70-105.
- Kothari, S.P., Leone, Andrew J. Leone., Wasley, Charles E. (2005). Performance Matched Discretionary Accrual Measures. *Journal of Accounting and Economics*, 163-197.
- Lo, A., W.Y., Wong, M.K. Raymond, dan M. Firth. (2009). Can Corporate Governance Deter Management From Manipulating Earnings? Evidence From Related-Party Sales Transactions in China. *Journal of Corporate Finance*, 16, 225-235.
- Loviana, N. (2008). Pengaruh Jenis Industri, Praktek Corporate Governance, dan Kapitalisasi Pasar terhadap Proporsi Transaksi Pihak berelasi. Tesis. Depok: Pascasarjana FEUI.
- Kohlbeck, M., dan B. Mayhew. (2004). Related Party Transaction. *University of Wisconsin – Madison*.
- Mayhew, B., dan M. Kohlbeck. (2009). Valuation of Firms That Disclose Related Party Transaction. *Journal Account. Public Policy*, 29, 115-137.
- Mc Nichols, M. (2000). Research Design Issues in Earnings Management Studies. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19, 313-345.
- Parulian, S.R. (2004). *Analisis Hubungan Antara Komite Audit dan Komisaris Independen dengan Praktek Manajemen Laba: Studi Empiris Perusahaan di BEJ*. Tesis. Depok: Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peivy. (2009). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dan Biaya Hutang pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Peraturan Bapepam-LK No. VIII G.7 Tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan”.
- PSAK No. 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi (Revisi 2010).
- Rachmawati, Randy. (2009). *Pengaruh Size RPT dan Tingkat Pengungkapan RPT di Laporan Keuangan Terhadap Profitabilitas Perusahaan*. Tesis. Depok: Pascasarjana FEUI.
- Rivano, Muhammad. (2009). *Pengaruh Praktek Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kategori Kantor Akuntan Publik, Jenis Industri, dan Nilai Transaksi Pihak berelasi Terhadap Tingkat Pengungkapan Transaksi Pihak berelasi*. Tesis. Depok: Pascasarjana FEUI.
- SA Seksi 334 Pihak yang Memiliki Pihak berelasi.

- Siregar, V, S. and Utama, Sidharta. (2008). Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, 43, 1-27.
- Xie, Biao., Davidson III, Wallace.N., Dadalt, Peter J. Earnings Management and Corporate Governance: The role of the board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance*, 9, 295-316.